

**ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA DI
DESA PENYANGGA TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS, LAMPUNG
TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

KURNIA IEDMAL PITRADA

NPM. 2016041047



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA DI DESA PENYANGGA TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS, LAMPUNG TIMUR

Oleh

Kurnia Iedmal Pitrada

Pengelolaan ekowisata desa penyangga di kawasan taman nasional tentunya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terlebih lagi konsep pengembangan ekowisata ini dapat mendorong desa tersebut agar menggali potensi yang dimilikinya demi mencapai kemandirian dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memetakan kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga di Taman Nasional Way Kambas. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dengan statistika deskriptif. Proses analisis data dilakukan melalui berbagai tahapan menurut Reed et al. (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang termasuk kedalam kelompok key player adalah Taman Nasional Way Kambas, Wildlife Conservation Society, dan Komunitas Pesona Plang ijo. Pemangku kepentingan yang termasuk kedalam kategori Subject yaitu koperasi desa ratu karang sari, koperasi desa dewi rasa, pokdarwis desa labuhan ratu VI. Pemangku kepentingan yang termasuk dalam kategori context setter yaitu dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Lampung Timur. Terakhir pemangku kepentingan Crowd yaitu Pokdarwis labuhan Ratu VII, KTH Rahayu Jaya, KTH Plangijo Permai. Alert, dan Koperasi wisata Labuhan Ratu VI. Penguatan keterlibatan serta pengaruh dari masing-masing stakeholder terhadap pengembangan ekowisata desa penyangga TNWK diperlukan koordinasi, kolaborasi, dan peran aktif stakeholders guna memaksimalkan berbagai program ekowisata yang direncanakan dalam mewujudkan pengelolaan ekowisata desa penyangga yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Ekowisata Desa Penyangga, Analisis Stakeholder, TNWK.*

ABSTRACT

STAKEHOLDER ANALYSIS IN THE MANAGEMENT OF BUFFER VILLAGE ECOTOURISM IN WAY KAMBAS NATIONAL PARK, EAST LAMPUNG

By

Kurnia Iedmal Pitrada

Ecotourism management of buffer villages in national park areas certainly involves various stakeholders. Moreover, the concept of ecotourism development can encourage the village to explore its potential in order to achieve independence in development. This study aims to analyze and map the interests and influence of stakeholders in the management of buffer village ecotourism in Way Kambas National Park. The method used in the research is a quantitative approach with descriptive statistics. The data analysis process was carried out through various stages according to Reed et al. (2009). The results show that the stakeholders included in the key player group are the Way Kambas National Park, Wildlife Conservation Society, and Community Pesona Plangijo. Stakeholders included in the Subject category are the Village Cooperative Ratu karang sari, Village Cooperative Dewi rasa, and Pokdarwis Labuhan Ratu VI. Stakeholders included in the context setter category are the East Lampung Tourism, Youth and Sports Department. The crowd consists of the Pokdarwis labuhan Ratu VII, Two Forest Farmers Group, Alert, and Tourism Cooperative Labuhan Ratu VI. Strengthening the involvement and influence of each stakeholder on the development of ecotourism in the buffer village of TNWK requires coordination, collaboration, and the active role of stakeholders to maximize the various ecotourism programs planned in realizing sustainable management of buffer village ecotourism.

Keywords : Buffer Village Ecotourism, Stakeholder Analysis, TNWK.

**ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA DI
DESA PENYANGGA TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS, LAMPUNG
TIMUR**

Oleh

KURNIA IEDMAL PITRADA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS *STAKEHOLDER* DALAM
PENGELOLAAN EKOWISATA DESA
PENYANGGA DI TAMAN NASIONAL WAY
KAMBAS LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : Kurnia Iedmal Pitrada

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016041047

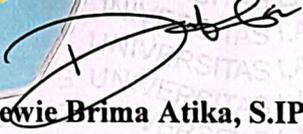
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



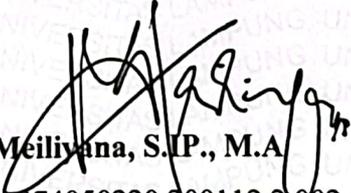

Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.

NIP. 197101221995122001


Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.

NIP. 19821212 2008012017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliana, S.IP., M.A

NIP. 1974050220 200112 2002

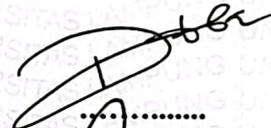
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

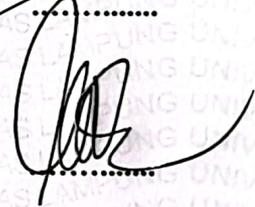
Ketua : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.



Sekretaris : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.



Penguji : Dr. Dian Kagungan, M.H.



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal lulus : 07 Agustus 2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini muni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,



Kurnia Iedmal Pitrada
NPM 2016041047

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Kurnia Iedmal Pitrada, lahir di Rajabasa Lama I, Kecamatan Labuhan Rat, Lampung Timur pada tanggal 01 Januari 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Bahtiar Sugandhi dan Ibu Yulinar Prihatin. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Rajabasa Lama diselesaikan pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Labuhan Ratu diselesaikan pada tahun 2017 dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Way Jepara diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat. Selain itu, penulis juga turut serta dalam kegiatan magang MBKM dengan melaksanakan kegiatan magang di Balai Taman Nasional Way Kambas.

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah 286)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.

(Boy Chandra)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan rasa terimakasih saya kepada:

Kedua Orang Tua

Ibunda tercinta Yulinar Prihatin dan Ayahanda Bahtiar Sugandhi yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya dan keberhasilan dalam penulisan skripsi ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Ekowisata Desa Penyangga Di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Yulinar Prihatin dan Ayahanda Bahtiar Sugandhi yang selalu menjadi sumber inspirasiku dan tentunya tak pernah lelah dan senantiasa memberikan doa dan dukungannya agar sang penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang selalu tiada henti mencurahkan kasih dan sayangnnya kepada keluarga dan keikhlasannya selama ini. Terima kasih ya Allah karena telah memberikan kedua orang tua yang hebat dan sangat luar biasa dalam hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi kedua orang tua yang sangat kusayangi. Amiiin.
2. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan motivasi, serta dukungan kepada penulis. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah ibu selalu dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

3. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Semoga ibu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.
4. Ibu Dr. Dian Kagungan, M.H. dosen penguji yang telah meluangkan waktu juga memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam proses skripsi ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala urusan.
5. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis.
6. Ibu Meiliyana, SIP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.
9. Mba Wulan selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas kesabaran dalam membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan, yang cukup rumit dan butuh kedetailan.
10. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung beserta jajarannya serta staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan yang dibutuhkan penulis.
11. Abangku tersayang Dennys Yusdian Putra yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, serta dukungan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
12. Segenap pihak Balai Taman Nasional Way Kambas yang telah memberikan dampingan dan dukungan penulis dalam proses penelitian.

13. Seluruh *Stakeholder* berserta infroman yang terlibat selama proses penulisan penelitian ini serta telah memberikan informasi, masukan, dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, serta dukungan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
15. Teman teman dekat *Squad Kontrakan* (Yahyuy, Hendro, Irpan, Irvan Panjoel, Bang Epans, dan Mas Yatiman) yang telah mendukung, membantu dan memberikan semangat baik secara moril dan materil selama masa perkuliahan penulis, serta menjadi rumah kedua bagi penulis yang telah menemani pada masa senang dan sulit serta hiburan yang tiada hentinya bersama dari awal hingga akhir perkuliahan.
16. Teman-teman KKN yang telah berbagi cerita selama masa KKN dan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
17. Seluruh teman-teman kelas Reguler A yang telah kebersamai dan berproses bersama dari awal perkuliahan hingga saat ini.
18. Teman-teman ADAMANTIA yang telah berproses bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini.
19. Keluarga besar HIMAGARA Universitas Lampung.
20. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena telah mempercayai saya, saya ingin berterima kasih kepada saya karena telah melakukan semua kerja keras ini. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena tidak memiliki hari libur. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena tidak pernah menyerah. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena selalu menjadi pemberi, dan berusaha memberi lebih dari yang saya terima.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, Agustus 2024
Penulis

Kurnia Iedmal Pitrada

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teori <i>Collaborative Governance</i>	12
2.3 Tinjauan Tentang Analisis <i>Stakholder</i>	14
2.4 Tinjauan Tentang Konsep Ekowisata	17
2.4.1 Aspek Ekowisata	18
2.4.2 Pengelolaan Ekowisata	19
2.4.3 Prinsip Ekowisata	21
2.5 Tinjauan Tentang Desa Penyangga dan Desa Wisata.....	21
2.6 Tinjauan Tentang Kawasan Taman Nasional.....	23
2.7 Kerangka Teori.....	25
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Definisi Konseptual Dan Operasional	29
3.6 Teknik Analisis Data	41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1 Sejarah Kawasan	45
4.1.2 Visi Misi TNWK	46
4.1.3 Letak Dan Luas Kawasan	47
4.1.4 Keanekaragaman Hayati & Ekosistem	48
4.1.5 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat	48
4.2 Deskripsi Variabel	50
4.3.1 Variabel Tingkat Kepentingan (<i>Interest</i>)	50
4.3.2 Variabel Tingkat Pengaruh (<i>Influence</i>)	53
4.3 <i>Stakeholder</i> Dalam Pengelolaan Ekowisata Desa Penyangga TNWK ..	56
4.4 Klasifikasi Kepentingan Dan Pengaruh <i>Stakeholder</i>	72
4.4.1 <i>Key Players</i>	75
4.4.2 <i>Subject</i>	77
4.4.3 <i>Context Setter</i>	78
4.4.4 <i>Crowds</i>	79
4.6 Analisis Peran <i>Stakeholder</i>	80
V. PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
5.2.1 Saran Untuk TNWK	85
5.2.2 Saran Untuk Dinas Pariwisata, kepemudaan, dan olahraga	86
5.2.3 Saran Untuk Komunitas Atau Kelompok Koperasi Desa	86
5.2.4 Saran Untuk Kelompok Tani Hutan	87
5.2.5 Saran Untuk Mitra Khusus TNWK	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kondisi Tujuan Ekowisata Desa Penyangga.....	4
2. Kerangka Pemikiran.....	26
3. Peta Lokasi Taman Nasional Way Kambas	47
4. Peta administrasi desa penyangga	49
5. Budidaya Lebah Klanceng	55
6. Camp Restorasi KTH Rahayu Jaya.....	56
7. Rest Area Desa Labuhan Ratu IX	57
8. Rest Area Desa Labuhan Ratu VII.....	58
9. Rest Area Desa Labuhan Ratu VI	59
10. Pemetaan <i>Stakeholders</i> Berdasarkan Pengaruh Dan Kepentingan Dalam Pengelolaan Ekowisata Desa Penyangga TNWK	60
11. Keterwakilan Pemuda Oleh Komunitas Pesona Plangijo.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kunjungan Wisatawan TNWK.....	2
2. Laporan Kegiatan Kemitraan Ekowisata di TNWK.....	3
3. Penelitian Terdahulu.....	8
4. Matriks Analisis <i>Stakeholder</i>	15
5. Daftar Responden Penelitian (<i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Ekowisata Desa Penyangga Di Taman Nasional Way Kambas)	25
6. Definisi Konseptual dan Operasional Penelitian... ..	27
7. Kriteria Penilaian Tingkat Kepentingan	35
8. Kriteria Penilaian Tingkat Pengaruh	37
9. Deskripsi Variabel Kepentingan (<i>Interest</i>)	50
10. Deskripsi Variabel Pengaruh (<i>Interest</i>).....	51
11. Hasil Perhitungan Nilai Tingkat Kepentingan <i>Stakeholders</i>	58
12. Hasil Perhitungan Nilai Tingkat Pengaruh <i>Stakeholders</i>	59

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu aspek penting sebagai sumber pendapatan pada suatu usaha wilayah. Potensi serta karakteristik pariwisata di Indonesia begitu dominan seperti pada keanekaragaman flora fauna, suku, budaya, keindahan alam, dan sebagainya. Kegiatan pariwisata ini semakin berkembang pesat terutama dalam bentuk wisata alam. Wisata alam merupakan suatu bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan sumberdaya alam dan tata lingkungan Suwantoro dalam Utami (2017). Terdapat banyak sekali konsep wisata alam yang ada di Indonesia, seperti Kebun Raya, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Taman Nasional dan sebagainya.

Kegiatan wisata alam ini didorong dengan adanya ancaman terkait dengan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dihindari khususnya pada kawasan hutan konservasi. Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Terdapat 6.381 desa termasuk komunitas masyarakat yang tinggal di sekitar hutan konservasi di Indonesia dimana kelompok ini tentunya tidak hanya membawa dampak positif tetapi memungkinkan juga dapat merusak kawasan tersebut (KLHK, 2022). Konsep kepariwisataan diharuskan menuju perubahan dari pariwisata yang eksploitatif menjadi konsep pariwisata berkelanjutan yang mengadopsi konservasi alam. Prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan ini adalah salah satu pendekatan perencanaan kolaboratif yang melibatkan *stakeholders* untuk ikut serta dalam membangun konsep desa ekowisata.

Konsep ini merupakan salah satu alternatif dalam pengembangan sektor pariwisata yang lebih memperhatikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekologis dengan memperhatikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya (Fennel, dalam Nugraheni, 2002). Dari berbagai kegiatan ekowisata tentunya memiliki potensi guna mendorong keterlibatan masyarakat lokal melalui berbagai *stakeholders* dengan membawa konsep desa ekowisata. Konsep ini merupakan penetapan suatu daerah tujuan wisata dengan mengintegrasikan daya tarik di masing-masing desa penyangga dengan konsep tetap memperhatikan konservasi atau pelestarian lingkungan alam. Sehingga dengan adanya potensi SDA, SDM dan sumber daya sosial dan budaya dari masing-masing *stakeholder* akan dapat mempengaruhi perkembangan dari desa ekowisata (Arida, 2017).

Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur merupakan pusat latihan gajah pertama di Indonesia dan salah satu warisan negara dengan keanekaragaman flora dan fauna yang masih terjaga keberlangsungannya. Masalah di kawasan konservasi, terutama taman nasional, sering terjadi di area penyangga yang berbatasan dengan desa atau pemukiman. Oleh karena itu, dikembangkanlah konsep konservasi baru yang inovatif, kreatif, dan selektif untuk mereposisi ilmu pengetahuan dan teknologi konservasi, guna mendukung usaha yang dapat menyelaraskan kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. (Sulistiowati, 2022). Kondisi tersebut akan sangat relevan dengan konsep pengembangan ekowisata dengan memanfaatkan potensi yang ada pada desa-desa penyangga. Konsep pengembangan pariwisata di kawasan desa penyangga Taman Nasional bertujuan untuk mendorong desa tersebut agar menggali potensi yang dimilikinya demi mencapai kemandirian dalam pembangunan. Meskipun pemberian fokus pada aspek ekonomi, upaya ini sebenarnya memiliki aspek konservasi yang sangat penting. Kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren positif pada angka rata-rata 7,6 % per tahun dengan tujuan wisata penginapan *ecolodge*, pengamatan satwa liar, kesenian masyarakat lokal, dan lain sebagainya (BPS Lampung Timur, 2020).

Tabel 1. Kunjungan Wisatawan TNWK

Tahun	Jumlah Wisatawan		Total
	Domestik	Mancanegara	
2016	35.557	362	35.919
2017	78.786	392	79.178
2018	92.930	694	93.624
2019	98.068	458	98.525
2020	23.042	73	23.115
2023	42	-	42
2024 (januari - juli)	1014	41	1055

Sumber : TNWK, 2024.

Jumlah kunjungan wisata di Taman Nasional Way Kambas pada tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan khususnya pada kunjungan wisatawan domestik. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 dan setelahnya hingga akhir tahun 2023 semua aktivitas wisata di Taman Nasional Way Kambas diberhentikan dan hanya aktivitas penelitian yang masih berjalan sesuai ketentuan protokol kesehatan yang berlaku dimasa pandemi. Kemudian, mulai tanggal 20 desember 2023, Taman Nasional Way Kambas dibuka kembali dengan konsep wisata baru yang sudah direncanakan dan dikoordinasikan dengan para *stakeholder* guna mendorong kemandirian perekonomian masyarakat. Dengan pencatatan pengunjung dari mulai tanggal 20-31 desember 2023 ini terdapat 42 pengunjung domestik yang berwisata ke Taman Nasional Way Kambas dan desa-desa penyangga. Sektor pariwisata yang berkelanjutan akan dapat memastikan operasi ekonomi dalam jangka panjang serta memberikan manfaat sosio-ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk 1) Lapangan kerja yang stabil, 2) pendapatan peluang, 3) Pelayanan sosial kepada masyarakat sekitar. (Kagungan, 2019)

Berdasarkan data diatas, pihak Taman Nasional Way Kambas menyusun rencana pemberdayaan masyarakat daerah penyangga Taman Nasional Way Kambas periode 2016-2025 dengan menetapkan desa-desa prioritas dalam pengembangan wisata di sekitar kawasan TNWK. Diharapkan dengan

keterlibatan serta pengaruh yang diberikan kepada masing-masing *stakeholders* penetapan desa prioritas tersebut akan mampu memaksimalkan potensi dari desa penyangga serta dapat mendukung pengembangan aktivitas ekowisata dan upaya konservasi yang dilakukan. Namun, upaya pemberdayaan masyarakat pada desa-desa prioritas tersebut masih belum terintegrasi secara sistematis dan menemukan berbagai kendala, dapat dilihat berdasarkan pada tabel berikut :

Tabel 2. Laporan Kegiatan Kemitraan Ekowisata di TNWK

No	Pemangku Kepentingan	Desa	Permasalahan	Keterangan
1	Pemerintah Desa	Rantau Jaya Udik II	Lemahnya peran serta perhatian dalam mengembangkan program agro wisata.	Dari total 6 program ekowisata yang melibatkan pemerintah desa, sejauh ini hanya tiga yang masih berjalan.
2	POKDARWIS	Labuhan Ratu VI	Lepas tanggungjawab atas pengelolaan serta perawatan area wisata kunci di desa.	Minimnya kegiatan selaku aktor lapangan dalam pengelolaan ekowisata (<i>crowd</i>).
3	Kelompok Tani Hutan	Labuhan Ratu IX	Berhentinya berbagai kegiatan ekowisata.	Berbagai kegiatan KTH tidak berjalan seperti <i>camping ground, homestay, home industry (UMKM)</i> , dll.

Sumber : Laporan Rencana Pengelolaan Kolaboratif TNWK. 2022.

Berbagai permasalahan diatas disebabkan oleh lepasnya tanggungjawab dari *stakeholder* atas pengelolaan objek ekowisata. Dalam hal ini, pemerintah desa dan pokdarwis selaku pengelola objek wisata tentunya bertanggungjawab atas fasilitas tersebut (Wawancara Ketua Pokdarwis, 02 Agustus 2023). Hal ini dipicu oleh kesadaran dari *stakeholder* terkait serta menurunnya kualitas sumber daya manusia (masyarakat lokal) sebagai pelaksana program yang masih sangat terbatas (Pusat Informasi Lingkungan Indonesia, 2019).



Gambar 1. Kondisi tujuan ekowisata desa Labuhan Ratu VI

Sumber : Diolah Peneliti 2023

Di Desa Labuhan Ratu VI juga telah dikategorikan sebagai desa penyangga yang cukup berkembang karena memiliki IDM 56,46 %, dengan sumber daya masyarakat yang cukup mumpuni dalam membangun desa wisata dan terdapat beberapa jenis wisata namun belum berkembang karena pengelolaan wisata yang masih belum maksimal (Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2019). Kerjasama mitra kelembagaan di desa binaan ekowisata masih menemukan berbagai kendala dalam pengintegrasian serta partisipasi dari masing-masing *stakeholder* terhadap rencana program yang mengacu pada pengembangan model desa (Wawancara pegawai TNWK, 24 Juli 2023).

Seperti halnya pada Kelompok Tani Hutan Plangijo Permai terdapat berbagai kegiatan ekowisata di desa penyangga mengalami penurunan intensitas kegiatan, seperti *camping ground*, *tour guide*, agrowisata lebah dan lain sebagainya. Hal ini salah satunya disebabkan adanya keterbatasan anggaran dan minimnya sinergitas serta koordinasi antar *stakeholder* sebagai pengelola objek ekowisata desa penyangga. (KTH Plang Ijo Permai, 2023).

Terkait dengan permasalahan ini, analisis pemangku kepentingan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai relevansi kelompok individu atau lembaga kunci yang berpotensi berpengaruh besar terhadap kesuksesan pengelolaan ekowisata. Dengan penelitian ini, nantinya pihak Taman Nasional Way Kambas akan dapat lebih menekankan dan mempertegas keterlibatan serta tanggungjawab mitra-mitra terkait agar lebih aktif dan peduli dalam pengelolaan maupun perawatan objek ekowisata yang dikelola. Analisis peran *stakeholder* akan cukup relevan dan menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi program kerjasama atau kemitraan *stakeholders* di TNWK. Rastologi dalam Nurhikmah (2017) kunci dari keberhasilan dalam penentuan program kebijakan dan dukungan terhadap penyelesaian suatu masalah akan sangat tergantung pada keterlibatan serta peran *stakeholder* terkait dalam proses implementasi dan pengelolaan suatu program.

Kerlibatan dari setiap *stakeholders* nantinya akan mampu memberikan perencanaan strategis pariwisata yang tepat guna dan dapat menghindari konflik kepentingan (*konflik of interest*) yang timbul selama proses implementasi kebijakan dan menyatukan mereka dalam keterlibatan peran pengelolaan pariwisata (Waligo, Clarke, & Hawkins, 2013). Penguatan peran *stakeholders* dalam pengelolaan ekowisata di TNWK tentunya akan mampu membangun konsep ekowisata berkelanjutan khususnya bagi masyarakat setempat dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial kultural. Salah satu faktor keberhasilan pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan yaitu dengan mengukur sejauh mana kapasitas *stakeholder* terkait dalam mengimplementasikan program serta penguatan jejaring kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan (Suryadiarta, 2012).

Penguatan keterlibatan *stakeholder* pada pengembangan ekowisata di kawasan desa penyangga TNWK diperlukan kerjasama, koordinasi, dan peran aktif *stakeholders* secara nyata di lapangan guna memaksimalkan berbagai program yang telah direncanakan dalam pengelolaan kolaboratif TNWK di tahun 2018-2023. Program tersebut bertujuan untuk mensinergiskan semua *stakeholders* terkait terhadap pemanfaatan serta pengoptimalan potensi kawasan desa penyangga. Dengan total 37 desa penyangga serta penetapan desa-desa prioritas pengembangan pariwisata tentunya menjadi potensi maupun ancaman bagi keberlangsungan TNWK. Sehingga kepentingan serta pengaruh dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat menjadi salah satu kunci utama dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga. Kemudian, peneliti menggunakan teori dari Reed et. Al. (2009) dengan pengklasifikasian *stakeholder* sebagai *Key Players*, *Subject*, *Context Setter*, Dan *Crowd* sebagai acuan penulisan penelitian dengan judul “Analisis *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Ekowisata Desa Penyangga di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai program serta kemitraan yang telah dijalin oleh pihak Taman Nasional Way Kambas dengan mitra terkait pengelolaan ekowisata serta banyaknya potensi ekowisata di desa penyangga yang belum dimanfaatkan dan dikelola yang disebabkan oleh lepasnya tanggungjawab serta peran dari masing-masing *stakeholders* terkait. Maka, dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga Taman Nasional Way Kambas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa serta memetakan kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga Taman Nasional Way Kambas sebagai upaya penguatan peran *stakeholder* dan pemanfaatan potensi ekowisata desa penyangga.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan kepada peneliti yang melakukan penelitian pada bidang yang sama dalam hal ini yang berkaitan tentang pengelolaan desa ekowisata di desa penyangga Taman Nasional Way Kambas.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan desa ekowisata di desa penyangga Taman Nasional Way Kambas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini merupakan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebuah acuan atau tolak ukur dalam menyelesaikan proses penyusunan penelitian ini dan penting sebagai dasar dalam memudahkan peneliti untuk menentukan langkah-langkah sistematis berdasarkan dengan aspek konsep ataupun teori dalam menyusun penelitian. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pada penelitian ini, di mana peneliti mengkaji penelitian tentang analisis *stakeholder* dalam pengelolaan desa ekowisata di desa penyangga kawasan taman nasional. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Dwiasuti (2021).	Pengelolaan Ekowisata Kerujuk Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara.	Pengelolaan ekowisata kerujuk masyarakat lokal mengerjakannya dengan swadaya dalam pengelolaan serta adanya perubahan terhadap sarana dan prasarana yang ada, guna lebih terawat dan mampu memberikan atau menyuguhkan hal yang baru kepada wisatawan.
2	Gunawan, (2021)	Strategi Pengembangan Potensi Ekowisata Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	Hasil yang diperoleh faktor penyebab belum berkembangnya ekowisata di desa kahayya adalah keterbatasan sarana Pendukung diantaranya penginapan, rumah makan, dan toko cinderamata. untuk strategi pengembangan ekowisata yang dapat dikembangkan untuk tahun mendatang adalah menggunakan strategi diferensiasi.

3	Nugroho (2022)	Analisis Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Pariwisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplemtasikan berbagai strategi tentunya tidak semua peran mampu dijalankan dengan optimal oleh <i>stakeholder</i> yang terkait. Dibutuhkan pemetaan <i>stakeholder</i> berdasarkan dengan tingkat kepentingan serta pengaruhnya masing-masing.
4	Nazwin & Hidayat (2022)	Evaluasi Pengelolaan Ekowisata: A Systematic Literature Review	Banyaknya perusahaan di sektor pariwisata yang tidak bisa berkomitmen secara nyata untuk mengambil langkah restorasi ekologis dan hanya berfokus pada upaya peningkatan manfaat dari proyek ekowisata secara fisik yang pada akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan konservasi. Diperlukannya konsep baru guna mengevaluasi pengelolaan.
5	Sentanu, I. G., Dkk.(2021)	<i>Stakeholder</i> Collaboration Model for Ecotourism Development : a Case Study from batu city, east java province	Pengelolaan ekowisata Kota Batu belum berjalan optimal yang disebabkan Pemerintah belum mampu memaksimalkan potensi alam yang terdapat di Kota Batu dalam proses pengembangan ekowisata yang hanya menggantikan potensi wisata alam yang belum dikelola menjadi potensi wisata buatan. Tidak adanya peta jalan ekowisata di Kota Batu yang membuat banyak pihak yang terlibat lebih leluasa mengkonversi fungsi lahan hijau menjadi area pemukiman, vila, perkebunan, dan lain-lain.
6	Susanto, dkk (2019).	Konsep Pengembangan Desa Ekowisata Pampang Berbasis Partisipasi Masyarakat	Desa Ekowisata Pampang memiliki banyak potensi wisata diantaranya: kerajinan perak, Area Pusat konservasi Burung, susur sungai arung jeram, agrowisata, <i>Outbound, Camping ground</i> , dan keragaman adat budaya masyarakat. Pengembangan desa ekowisata Pampang saat ini telah mengarah pada pengembangan ekowisata yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dengan berbagai faktor pendukung internal yaitu dukungan aparat desa dan masyarakat terhadap pengembangan Pariwisata,

banyaknya jumlah SDM yang terlibat dalam pengelolaan, dan peluang Kerjasama dengan berbagai pihak.

Sumber : diolah peneliti, 2023

Penelitian yang dilakukan oleh Dhea Aprilia berkaitan dengan pengelolaan ekowisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta dampak apa saja yang terjadi dalam mengelola ekowisata tersebut. Selanjutnya, pada skripsi Muhammad Arif Gunawan mengkaji tentang bagaimana strategi pengembangan yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan potensi ekowisata desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Pada penelitian Aristya Benny Nugroho bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari sektor pariwisata untuk meningkatkan aspek perekonomian masyarakat. Penelitian yang dilakukan Asfarony Hendra dan Rahmad Hidayat bertujuan untuk merumuskan kembali indikator yang penting dalam mengevaluasi ekowisata secara holistik.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh I Gede Eko Sentanu, Ardian Prabowo, dkk. Berfokus pada identifikasi stakeholders yang relevan dalam melakukan kolaborasi dan mengamati aspek sosial ekonomi di sektor ekowisata. Terakhir, penelitian yang dilakukan Oleh Eko Susanto dkk. Berfokus pada pengoptimalan kembali berbagai potensi ekowisata yang terdapat di desa pampang dengan mengusung konsep pemberdayaan masyarakat. Sedangkan, pada penelitian ini terkait dengan bagaimana peran dari masing-masing *stakeholder* dalam mengelola ekowisata di desa penyangga serta keterlibatan setiap *stakeholders* yang nantinya mampu memberikan perencanaan dan strategi dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK.

2.2 Tinjauan Teori *Collaborative Governance*

Collaborative governance adalah pendekatan pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di luar lingkup pemerintahan atau negara. Pendekatan ini lebih mengutamakan kesepakatan dan dialog dalam proses pengambilan keputusan bersama, dengan tujuan untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2007). Pada teori ini menekankan pada enam kriteria yaitu :

1. Forum ini diinisiasi oleh lembaga publik.
2. Peserta dalam forum terdapat aktor swasta
3. Peserta dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik.
4. Terorganisir.
5. Memiliki tujuan untuk menciptakan keputusan dengan konsensus.
6. Fokus kolaborasi yang dilakukan ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Sementara itu, *Collaborative Governance* menurut The William and Flora Hewlett Foundation (2016) memiliki dua konsep inti, yaitu:

1. Kolaborasi: Untuk bekerja sama dengan rekan kerja dalam mencapai tujuan bersama, melibatkan kerjasama lintas sektor dengan dasar nilai timbal balik.
2. Tata Kelola: Untuk mengarahkan proses yang memengaruhi keputusan dan tindakan di sektor swasta, publik, dan masyarakat secara umum.

Menurut Robert & Taehyon (dalam Subarsono, 2016), *collaborative governance* adalah suatu proses yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki wewenang substansial untuk membuat keputusan bersama, di mana setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan keputusan yang tercermin dalam keputusan bersama. Konsep ini menitikberatkan pada pentingnya kerjasama antara aktor publik dan bisnis privat untuk menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk masyarakat. *Collaborative Governance* melibatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta, diatur oleh komitmen timbal balik, yang melampaui kontrak antar organisasi sektor publik dan swasta Bovaird dalam (Dwiyanto, 2011). Kemitraan ini dan kolaborasi pemerintah dengan lembaga di luar pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa arena, seperti kolaborasi internal pemerintah, kolaborasi antara pemerintah dan bisnis, serta kemitraan antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil.

(Akbar, 2022) mengemukakan bahwa konsep *collaborative governance* mewakili usaha pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang rumit, dengan menyoroti hubungan timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan di luar pemerintah. Permasalahan-permasalahan tersebut memiliki karakteristik kompleks dan dinamis, sehingga penyelesaiannya tidak mungkin dilakukan oleh satu organisasi saja, yaitu pemerintah; oleh karena itu, diperlukan kolaborasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, civil society, dan private sector dianggap sebagai langkah-langkah untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan publik dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Subarsono, 2016).

2.3 Tinjauan Tentang Analisis *Stakeholder*

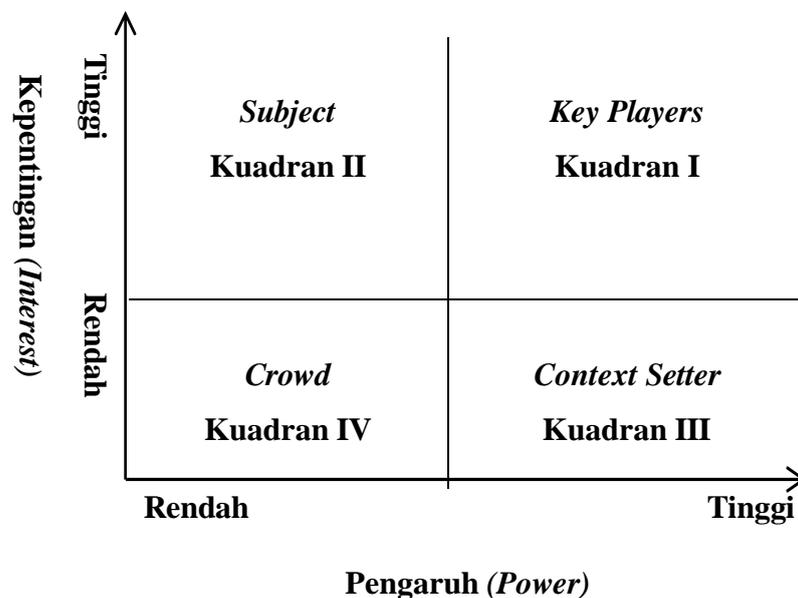
Istilah *stakeholders* atau pemangku kepentingan pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (SRI) pada tahun 1963 yang disampaikan oleh Freeman (1984) menyatakan bahwa teori pemangku kepentingan menggambarkan tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pihak, termasuk direksi, karyawan, dan masyarakat. Freeman pertama kali mengembangkan teori *stakeholder* untuk menjelaskan perilaku korporasi dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013). Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menguntungkan investor dan pemilik, tetapi juga memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sosial. Pemangku kepentingan memegang peran krusial dalam kelangsungan hidup perusahaan karena memiliki pengaruh terhadap sumber daya yang diperlukan dalam aktivitas operasional perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Stakeholder menurut (Nugroho, 2015) diartikan sebagai individu atau kelompok organisasi yang memiliki keterlibatan, kepentingan, dan dipengaruhi secara positif maupun negatif oleh kegiatan atau program pembangunan. Dimana dalam pembangunan sektor pariwisata pada dasarnya akan melibatkan tiga *stakeholder* yang saling berkaitan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Sehingga setiap *stakeholder* tentunya memiliki peran serta fungsi yang berbeda-beda agar pengembangan wisata di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

Pengkategorian keterlibatan *stakeholder* menggunakan kuadran kepentingan dan pengaruh menurut Reed et al. (2009) diklasifikasikan ke dalam empat kategori dengan masing-masing posisi *stakeholder* sebagai berikut :

1. *Key players* adalah sekelompok *stakeholder* yang memegang peran utama dan memiliki dampak yang signifikan dalam proses implementasi manajemen pengelolaannya.
2. *Subjek* adalah *stakeholder* yang memiliki nilai yang penting namun memiliki dampak yang terbatas dalam pengelolaan dan implementasi manajemen kebijakan.
3. *Context setter* adalah *stakeholder* yang memiliki dampak yang besar, tetapi nilai pentingnya terbatas dalam pelaksanaan serta pengelolaannya.
4. *Crowd* adalah *stakeholder* yang memiliki nilai yang penting, tetapi dampaknya terbatas dalam pengelolaannya.

Tabel 4. Matriks Analisis Stakeholder



Sumber : Reed et al. (2009)

Analisis *stakeholder* adalah metode untuk menggali informasi terkait pihak-pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh setiap keputusan atau kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Bryson (2003), yang esensial adalah mengidentifikasi aktor yang terdampak, baik secara positif maupun negatif, seperti yang dinyatakan oleh Grimble & Wellard (1997). Menurut Brugha dan Varvasovsky (dalam Reed et al., 2009) menjelaskan bahwa analisis *stakeholder* adalah alat yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai "pemain yang relevan" dan memahami cara mereka memengaruhi proses pengambilan keputusan. Weible (2006) mencirikan analisis *stakeholder* sebagai proses mengidentifikasi peluang dan hambatan serta memprediksi kemungkinan hasil keputusan.

Analisis *stakeholder* sangat diperlukan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi peran masing-masing *stakeholder* yang terlibat sebagai aktor atau kelompok yang mempengaruhi keberhasilan suatu program kebijakan (Oktavia Dan Saharuddin, 2013). Peran dan keterlibatan masing-masing *stakeholder* dapat diidentifikasi dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Groenendijk (2003) dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berdasarkan dengan tingkat kepentingannya secara langsung maupun tidak langsung terhadap program atau proyek yang ada.

Dari ke-empat klasifikasi *stakeholder* yang dikemukakan oleh Reed et al. (2009), yang merupakan *stakeholder* dengan peran penting atau sangat dibutuhkan dalam pengelolaan ekowisata adalah *stakeholder* pada kuadran *Key Players*. Dimana pada bagian ini merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan atas proses pengambilan keputusan. Sehingga pada *stakeholder* ini nantinya akan menerima dan memberikan dampak baik positif ataupun negatif dari program atau kebijakan yang dijalankan. *Stakeholder* ini tentunya memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi sehingga mereka bertanggungjawab penuh pada bagaimana pengelolaan manajemen yang sedang diimplementasikan. Dengan demikian, *stakeholder* kunci akan memainkan peran penting sebagai penentu keberhasilan jangka panjang,

mengambil keputusan strategis, meminimalkan resiko, mengembangkan program, dan dukungan anggaran.

2.4 Tinjauan Tentang Konsep Ekowisata

Menurut Suprayitno (2008) mengemukakan bahwa ekowisata merupakan model atau konsep wisata alam yang dikelola secara alami dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam dengan melibatkan unsur pendidikan serta upaya konservasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (Suprayitno, 2008). Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2009 tentang pengembangan pariwisata daerah, ekowisata dibedakan menjadi empat jenis yaitu ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan ekowisata karst. Sementara itu, Latupapua (2007) berpendapat bahwa ekowisata adalah suatu konsep yang menghubungkan antara pariwisata dengan konservasi alam atau lingkungan. Sehingga ekowisata dapat dipahami sebagai konsep pariwisata yang berwawasan lingkungan dan memberikan tanggungjawab kepada wisatawan dalam menjaga kualitas lingkungan.

Wood (2002) mendefinisikan ekowisata sebagai kegiatan wisata yang berbasis utama pada kegiatan wisata alam dengan melibatkan sebagian kegiatan wisata pedesaan dan wisata budaya. Sementara itu, Menurut Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia (2009), ekowisata memiliki banyak makna yang seluruhnya berprinsip pada pariwisata alam mengacu pada lima elemen penting, yaitu :

1. Memberikan pengalaman serta edukasi bagi wisatawan untuk meningkatkan pemahaman serta apresiasi terhadap lokasi wisata yang berkelanjutan.
2. Meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan kerusakan lingkungan.
3. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
4. Memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal.
5. Program jangka panjang dan berkelanjutan.

Dalam deklarasi Quebec (2005), menjelaskan bahwa ekowisata merupakan suatu konsep wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan pelestarian lingkungan yang membedakannya dengan bentuk wisata lainnya (Damanik & Weber, 2006). Dalam implementasinya dapat dilihat pada bentuk wisata yang mampu menyumbangkan kegiatan konservasi, melibatkan masyarakat, dan memberikan sumbangsih positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat (Heher, 2003).

2.4.1 Aspek Ekowisata

Menurut Page dan Ross (2002) mengemukakan bahwa terdapat aspek utama dari strategi pengembangan ekowisata yaitu pentingnya mengidentifikasi sumberdaya yang akan dikelola, menetapkan pintu gerbang regional, zona tujuan, dan rancangan program utama. Aspek ini di perlukan guna meningkatkan kualitas pelayann sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kepuasan wisatawan. Konsep pengembangan ekowisata tentunya harus memperhatikan berbagai perspektif yang ada. Menurut (The International Ecotourism Society, 2000) konsep ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu :

1. Lingkungan. Dimana realisasi konsep ekowisata harus tetap mempertahankan aspek lingkungan alam dan budaya agar tetap terjaga dan lestari.
2. Keterlibatan masyarakat dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara langsung kepada masyarakat setempat.
3. Aspek pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan ekowisata dengan meningkatkan pembangunan lingkungan alam serta budaya guna memaksimalkan pengalaman yang akan diperoleh.
4. Aspek keberlanjutan ekowisata dengan memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan ekosistem lingkungan.

5. Pengelolaan manajemen ekowisata dengan memberikan jaminan pengelolaan yang sehat dan jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

Menurut Nelson dalam (Page & Ross 2002) mengatakan bahwa berbagai kondisi dan prosedur dalam pengembangan ekowisata yang konsisten yaitu dengan penetapan peraturan dan prosedur relevan secara ekologis dan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga dibutuhkan keterlibatan pengelola (*stakeholder* baik swasta maupun pemerintah) dalam proses pengembangan ekowisata tersebut. Menurut *Unites Nations Commision On Sustainable Development* (2002) menyatakan bahwa ekowisata merupakan *sustainable tourism* yang meliputi berbagai aspek, yaitu :

1. Menjamin partisipasi yang setara, efektif dan aktif dari setiap *stakeholder* yang terlibat dan berperan aktif.
2. Menjamin partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pengembangan masyarakat, lahan dan wilayah guna mendorong geliat perekonomian.
3. Mengangkat mekanisme penduduk lokal dalam upaya hal kontrol dan menjaga pemeliharaan sumber daya alam.

2.4.2 Pengelolaan Ekowisata

Menurut Terry Dalam Rois Arifin (2016) pengelolaan pada dasarnya melibatkan pengaturan dan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan kerja tertentu. Keberhasilan dan manfaat ekowisata untuk masyarakat lokal, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, dapat tercapai ketika dapat menggabungkan potensi alam dari kawasan hutan yang dilindungi, aspek sosial masyarakat setempat, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku dan penyelenggara kegiatan ekowisata. Keterlibatan masyarakat ini dapat dianggap sebagai pemangku kepentingan *stakeholder* (Nurkhalis Et Al., 2018).

Menurut Nugroho (2003: 119), pengelolaan adalah bahasa yang biasa di pakai pada ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata management yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, manajemen adalah ilmu manajemen yang menyangkut pada proses pengelolaan dan pengolahan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dan perencanaan ekowisata berarti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mendatang dikarenakan ekowisata lama kelamaan juga menjadi sebuah kebutuhan tambahan yang sangat di perlukan oleh masyarakat pada umumnya. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk merupakan hal yang utama untuk menjawab keberlangsungan dalam pengolahan tersebut.

Menurut Andy Drumm & Alan Moore, (2002) dalam konteks perencanaan manajemen ekowisata, diperlukan persiapan sepanjang tahun untuk mempertimbangkan arah pengembangan di masa depan. Terdapat beberapa aspek kunci yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Area atau wilayah yang dilindungi harus terintegrasi dalam pembangunan wilayah atau tempat lokasinya berada.
2. Tujuan manajemen ekowisata harus menjadi fokus dalam setiap tahap perencanaan.
3. Perencanaan yang efektif harus melibatkan tim yang mewakili berbagai disiplin ilmu, lembaga, masyarakat lokal, akademisi, organisasi pariwisata, dan pemerintah. Setiap anggota tim harus memiliki peran yang jelas dalam perencanaan.
4. Interaksi antar individu harus dioptimalkan untuk menciptakan sinergi yang kuat.
5. Kesuksesan perencanaan sangat bergantung pada partisipasi yang efektif dari *stakeholder* yang relevan.

2.4.3 Prinsip Ekowisata

Berikut prinsip dalam melakukan ekowisata menurut The International Ecotourism Society (2005), Yaitu :

1. Mengurangi dampak lingkungan.
2. Membangun kesadaran dan menghormati lingkungan serta budaya.
3. Memberikan pengalaman positif untuk pengunjung dan tuan rumah.
4. Memberikan manfaat finansial secara langsung untuk konservasi.
5. Memberikan manfaat finansial dan wewenang bagi penduduk lokal.
6. Meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, iklim sosial, dan politik negara.

2.5 Tinjauan Tentang Desa Penyangga dan Desa Wisata

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan penyangga merupakan area yang mengelilingi kawasan lindung dan berfungsi untuk melindungi Kawasan Suaka Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar atau dari dalam kawasan, yang dapat menyebabkan perubahan fungsi atau kebutuhan kawasan tersebut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998). Berdasarkan definisi diatas, desa penyangga adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dalam sistem pemerintahan, yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung dan bertanggung jawab menjaga Kawasan Pelestarian Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam agar keutuhannya tetap terjaga.

Pengelolaan desa penyangga harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan didasarkan pada tiga aspek penting, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Hal ini bertujuan agar desa penyangga memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong kesadaran mereka dalam menjaga keutuhan kawasan konservasi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, 2018). Sementara itu, definisi dari desa wisata adalah bentuk pengembangan pariwisata yang fokus pada partisipasi masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan pedesaan. Desa wisata menawarkan produk wisata bernilai budaya dengan karakteristik tradisional yang kuat (Fandeli, Baiquni, Dewi, 2013).

Dalam pengembangan desa wisata, masyarakat setempat berperan sebagai subyek aktif. Ini berarti bahwa lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat desa tersebut menjadi tujuan wisata. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai agen promosi wisata dan inovator yang memberikan ide-ide untuk pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata bertujuan untuk melestarikan lingkungan alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Implementasi konsep desa wisata ini diharapkan menjadi salah satu bentuk pariwisata yang ramah lingkungan di masa depan (Juwita dalam Theofilus Retmana P, 2013).

Upaya Pemerintah dalam mendukung pembangunan desa wisata dapat dilihat dilihat dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 4 menyebutkan:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, serta budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
7. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

2.6 Tinjauan Tentang Kawasan Taman Nasional

Taman Nasional adalah suatu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem alam asli dan dikelola berdasarkan dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan pelestarian, pariwisata, dan rekreasi (Keputusan Menteri Kehutanan Ri No. 687/Kpts/-Ii/1989). Menurut Mackinnon (1993) Taman Nasional merupakan kawasan hutan yang dikhususkan untuk melindungi ekosistem alami guna memberikan nilai bagi pemanfaatan rekreasi, ilmiah, dan pendidikan. Sementara itu, menurut Pristiyanto (2005) Mendefinisikan taman nasional sebagai daerah atau kawasan yang dikelola dengan tujuan melestarikan ekosistem alami sehingga dapat memberikan manfaat atas perkembangan ilmu pengetahuan, destinasi wisata, dan objek edukasi.

Menurut the *International Union For Conservation Of Nature* (IUCN) menjelaskan bahwa taman nasional adalah kawasan atau daerah alami di daratan atau lautan yang tujuannya untuk melindungi integritas ekologi serta ekosistem yang kompleks agar dapat tetap terjaga untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Kawasan hutan konservasi

menurut Undang – Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan bahwa kawasan hutan memiliki berbagai ciri khas tertentu dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Alikodra (2012) pengelolaan kawasan hutan konservasi memiliki tujuan utama yaitu pencegahan kerusakan fungsi ekosistem dan lingkungan hidup yang ada didalamnya sehingga dapat menyuplai kebutuhan sosial serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pengelolaan kawasan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan fungsi lingkungan terhadap kualitas iklim, air, tanah, dan ekosistem flora dan fauna di kawasan tersebut.

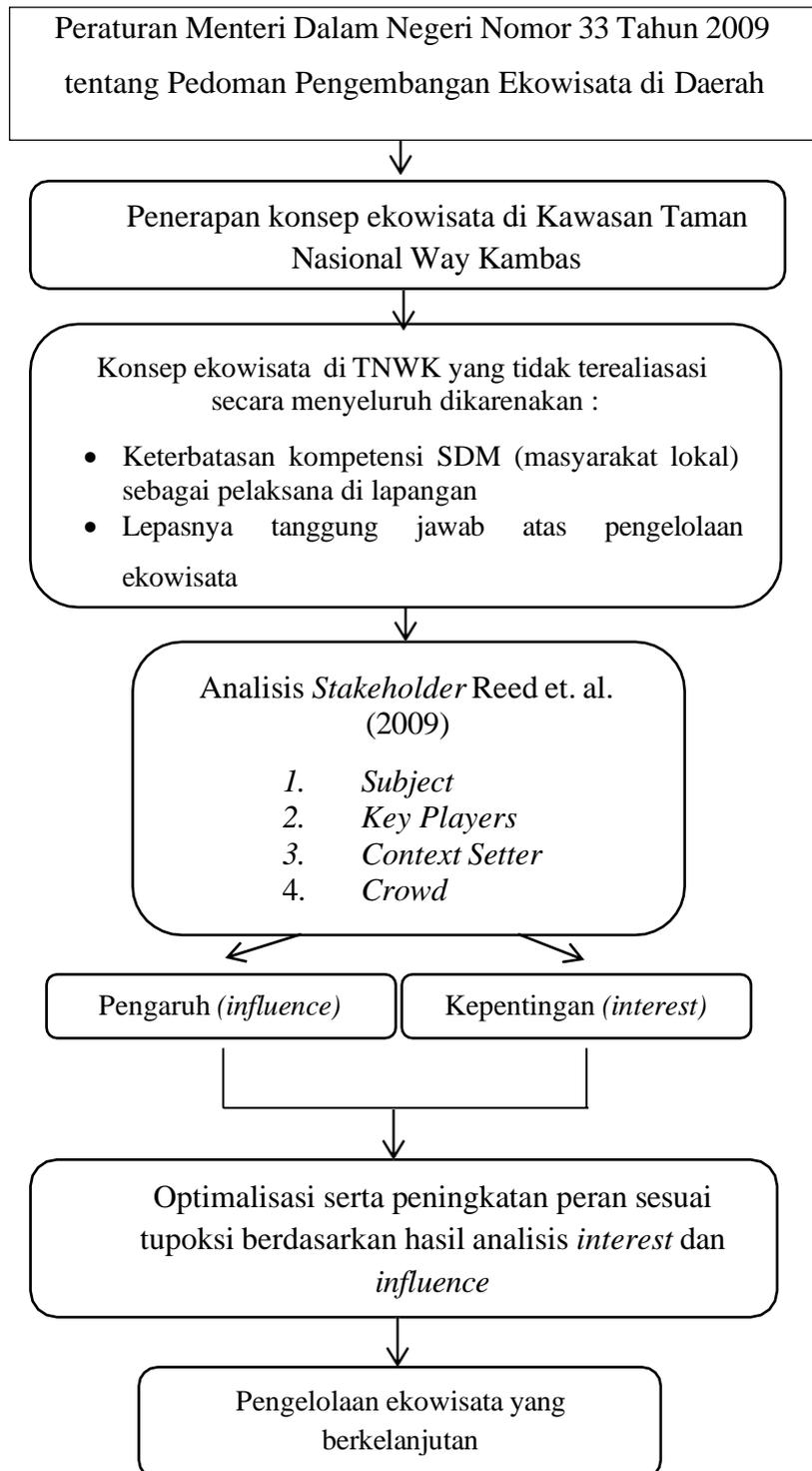
Taman Nasional Way Kambas merupakan suatu kawasan hutan konservasi yang berbentuk taman nasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-Ii/1999 tanggal 26 Agustus 1999 dengan luas kawasan kurang lebih sekitar 125,631.31 ha. Taman Nasional Way Kambas berbatasan langsung dengan 38 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang termasuk ke dalam Kabupaten Lampung Tengah Dan Kabupaten Lampung Timur. Sebagian besar desa-desa penyangga tersebut merupakan desa pemekaran baru yang mana populasi kepadatan penduduk desa tersebut masih relatif rendah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung tertuang dalam bab iv pasal 25 ayat 1 antara lain dapat dilakukan dengan :

1. Pemanfaatan jasa aliran air.
2. Pemanfaatan air.
3. Wisata alam.
4. Perlindungan keanekaragaman hayati.
5. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
6. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

2.7 Kerangka Teori

Pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi dapat dikelompokkan dengan menggunakan pendekatan pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*). Pemangku kepentingan tersebut dapat memiliki klasifikasi yang berbeda berdasarkan sejauh mana pengaruh (*power*) dan tingkat kepentingan (*interest*) mereka dengan mempertimbangkan perbedaan kedua dimensi tersebut. Masing-masing *stakeholder* dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu *players*, *context setter*, *subjek*, dan *crowds*, sebagaimana dijelaskan oleh Reed. et. al. (2009). Sehingga prinsip utama dalam menerapkan dan mengelola ekowisata dengan sukses adalah adanya kolaborasi di antara masing-masing *stakeholder*. Pemetaan pemangku kepentingan digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi mereka yang memiliki dampak positif atau negatif yang signifikan terhadap suatu inisiatif atau yang paling mungkin terpengaruh olehnya. Hal ini memungkinkan penentuan strategi keterlibatan yang sesuai untuk intervensi di masa depan.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti, (2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Metode atau pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti jumlah populasi atau sampel dengan pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian berupa analisis data bersifat kuantitatif/statistik (sugiyono, 2013). Kemudian tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang menyajikan data dengan jelas mengenai berbagai kondisi tertentu untuk mengetahui hasil nilai suatu variabel dengan variabel lainnya (Anshori, 2019). Penelitian dengan pendekatan kuantitatif tipe deskriptif akan menyajikan data yang dideskripsikan secara rinci terkait dengan permasalahan yang ada khususnya pada pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih tiga desa penyangga diantaranya Desa Labuhan Ratu IX, Desa Labuhan Ratu VII, dan Desa Labuhan Ratu VI, dikarenakan desa tersebut telah ditetapkan sebagai mitra khusus pada konsep baru wisata TNWK dan merupakan desa binaan dalam pengembangan ekowisata. Taman Nasional Way Kambas juga merupakan satu-satunya kawasan atau tempat konservasi serta latihan gajah sumatera yang secara resmi ditetapkan menjadi *ASEAN Heritage Parks (AHPs)* ke-36. Selain itu, sekitar kawasan ini memiliki berbagai potensi ekowisata yang ditawarkan berupa wisata alam (*nature tourism*), wisata budaya (*culture tourism*), dan wisata petualangan (*adventure tourism*).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan satu jenis data yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan dan berdasarkan hasil jawaban angket yang diberikan kepada responden di lapangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) yang telah ditentukan oleh peneliti kepada para responden melalui media *google form*. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, angket diberikan kepada responden menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2013) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK yang berjumlah 12 *stakeholder*, yang dapat dilihat pada tabel responden 5.

Tabel 5. Daftar Responden Penelitian (*Stakeholders* Dalam Pengelolaan Ekowisata Desa Penyangga TNWK).

No	Lembaga / <i>Stakeholders</i>	Keterangan
1	Taman Nasional Way Kambas	Koordinator Bagian Pusat Latihan Gajah TNWK
2	Koperasi Desa Labuhan Ratu VI	Ketua/Anggota
3	Koperasi Dewi Rasa Labuhan Ratu IX	Ketua/Anggota
4	Pokdarwis Desa Labuhan Ratu VII	Ketua/Anggota
5	Pokdarwis Pesona Plangijo Labuhan Ratu IX	Ketua/Anggota
6	KTH Rahayu Jaya	Ketua/Anggota
7	Koperasi Wisata Karang Sari Labuhan Ratu VII	Ketua/Anggota

8	<i>Wildlife Conservation Society (WCS)</i>	Ketua/Anggota
9	Aliansi Lestari Rimba Terpadu (Alert)	Ketua/Anggota
10	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahranga Lampung Timur	Sfaff/Pegawai bidang kemitraan
11	Pokdarwis Liman Wana Asri Lab. Ratu VI	Ketua/Anggota
12	KTH Plangijo Permai	Ketua/Anggota

Sumber: Diolah Peneliti, (2023)

3.5 Definisi Konseptual Dan Operasional

Guna memudahkan penulis dalam menganalisis serta mengolah hasil penelitian, maka diperlukan definisi konseptual dan operasional pada suatu variabel sebagai acuan yang jelas dalam melaksanakan penelitian yang akurat dan terstruktur. Menurut Singarimbun dan Effendi (2001) dalam Widarti (2019), definisi konseptual merupakan suatu pemaknaan konsep yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengaplikasikan konsep tersebut di lapangan. Sedangkan definisi operasional merupakan suatu informasi ilmiah yang digunakan untuk membantu peneliti lain yang akan melakukan riset atau penelitian dengan variabel yang sama. Dengan demikian, kedua konsep tersebut akan mengetahui bagaimana caranya yang digunakan dalam melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama (Wijaya & Huda, 2020). Berikut ini definisi konseptual dan operasional dari variabel-variabel pada penelitian ini, yaitu

Tabel 6. Definisi konseptual dan operasional penelitian

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Parameter	Indikator	Pertanyaan
Tingkat kepentingan an (<i>interest stakeholders</i>)	Menurut Weber dalam (Coleman et al. 2007), tingkat kepentingan suatu <i>stakeholders</i> mencerminkan sejauh mana dorongan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan tersebut dapat memengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil..	Tingkat kepentingan <i>stakeholder</i> menggambarkan sejauh mana kebutuhan dan keperluan mereka terhadap suatu program. Pengukuran tingkat kepentingan <i>stakeholders</i> berdasarkan pada berbagai parameter yaitu: keterlibatan, kewenangan, manfaat pengelolaan, program kerja (tupoksi), dan ketergantungan dari masing-masing <i>stakeholders</i> dengan menggunakan skala proporsional tinggi dan rendah.	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga	1. Perencanaan 2. Pengorganisasi an 3. Pelaksanaan 4. Pengawasan 5. Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah terdapat keterlibatan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam perencanaan ekowisata desa penyangga TNWK? • Apakah terdapat keterlibatan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara alam pembagian kerja pada ekowisata desa penyangga TNWK? • Apakah terdapat keterlibatan lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam pemeliharaan infrastruktur ekowisata desa penyangga TNWK? • Apakah terdapat keterlibatan lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam pengawasan ekowisata desa penyangga TNWK? • Apakah terdapat keterlibatan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam evaluasi ekowisata desa penyangga TNWK?

Manfaat
pengelolaan
ekowisata bagi
stakeholder

- a. Sumber penerimaan
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Membuka akses
- d. Promosi daerah
- e. Mendorong pembangunan

- Apakah lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara memperoleh manfaat berupa sumber penerimaan dalam pengelolaan ekowisata?
 - Apakah lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara memperoleh manfaat berupa Menciptakan lapangan kerja dalam pengelolaan ekowisata?
 - Apakah lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara memperoleh manfaat berupa membuka akses dalam pengelolaan ekowisata?
 - Apakah lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara memperoleh manfaat berupa promosi daerah dalam pengelolaan ekowisata?
 - Apakah lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara memperoleh manfaat berupa mendorong pembangunan dalam pengelolaan ekowisata?
-

Kewenangan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata	a. Perlindungan dan pengamanan obyek wisata b. Pembangunan sarana dan prasarana c. Memberikan layanan perijinan d. Pemberdayaan masyarakat e. Penyediaan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none">• Adakah bentuk kewenangan lembaga/ instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam aspek perlindungan dan pengamanan dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK?• Adakah bentuk kewenangan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK?• Adakah bentuk kewenangan lembaga/ instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan layanan perizinan dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK?• Adakah bentuk kewenangan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK?• Adakah bentuk kewenangan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam aspek penyediaan data informasi dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK?
---	---	--

Program kerja <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> a. $\geq 80\%$ dalam Tupoksi b. 60-79% dalam Tupoksi c. 40-59% dalam Tupoksi d. 20-39% dalam Tupoksi e. $< 20\%$ dalam tupoksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah terdapat tugas pokok lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dalam program kerja/paket wisata berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bird watching 2. Susur sungai 3. Kerajinan masyarakat 4. Kesenian budaya 5. Jungle tracking 6. Wisata edukasi lebah 7. Agrowisata 8. Elephant trip (edukasi dan menandakan gajah) 9. Savanna sunset 10. Visit umkm
Tingkat ketergantungan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> a. 81-100% ekowisata sebagai sumber pendapatan b. 61-80% ekowisata sebagai sumber pendapatan c. 41-60% ekowisata sebagai sumber pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah terdapat 81-100% tingkat ketergantungan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara terhadap keberlangsungan pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK? • Apakah terdapat 61-80% tingkat ketergantungan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara terhadap keberlangsungan pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK?

-
- | | |
|---|--|
| d. 21-40% ekowisata sebagai sumber pendapatan | • Apakah terdapat 41-60% tingkat ketergantungan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara terhadap keberlangsungan pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK? |
| e. <21% ekowisata sebagai sumber pendapatan | • Apakah terdapat 21-40% tingkat ketergantungan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara terhadap keberlangsungan pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK?
• Apakah terdapat <21% tingkat ketergantungan lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara terhadap keberlangsungan pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK? |
-

<p>Tingkat pengaruh (<i>influence</i>) <i>stakeholder</i></p>	<p>Tingkat pengaruh (<i>influence</i>) <i>stakeholder</i> merupakan seberapa besar pengaruh <i>stakeholder</i> terhadap keputusan atau langkah selanjutnya terhadap proyek organisasi baik menuju arah kesuksesan maupun kegagalan (Dachi & Djakman, 2020).</p>	<p>Tingkat pengaruh (<i>influence</i>) <i>stakeholder</i> menunjukkan tinggi rendahnya kemampuan <i>stakeholder</i> dalam memengaruhi suatu program/proyek. Pengukuran tingkat pengaruh <i>stakeholders</i> berdasarkan pada berbagai parameter yaitu: kondisi kekuatan, kelayakan, kekuatan kompensasi, kekuatan kepribadian, dan kekuatan organisasi pada masing-masing <i>stakeholders</i> dengan menggunakan skala proporsional (tinggi dan rendah).</p>	<p>Kondisi kekuatan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata</p>	<p>a. Opini/pendapat b. Kebudayaan c. Pendidikan d. Promosi/iklan e. Aturan/pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara dapat memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain melalui Opini/ pendapat? • Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memengaruhi lembaga/instansi/ kelompok lain melalui kebudayaan yang dimiliki? • Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain sesuai dengan kondisi lembaga/instansi/kelompok tersebut melalui pendidikan? • Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain sesuai dengan kondisi lembaga/instansi/kelompok tersebut melalui promosi/iklan? • Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain sesuai dengan kondisi lembaga/instansi/kelompok tersebut melalui aturan/pengawasan?
---	---	--	--	--	--

Kondisi kelayakan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata	a. Sanksi administrasi b. Sanksi finansial c. Sanksi hukum d. Sanksi moral e. Sanksi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan sanksi untuk memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain dalam pengelolaan ekowisata dalam bentuk Sanksi pencabutan perizinan, pembebasan jabatan atau yang lainnya? • Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan sanksi untuk memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain dalam pengelolaan ekowisata dalam bentuk Sanksi denda? • Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan sanksi untuk memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain dalam pengelolaan ekowisata dalam bentuk Sanksi hukum? • Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan sanksi untuk memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain dalam pengelolaan ekowisata dalam bentuk Sanksi berupa pengucilan, atau penolakan di kegiatan masyarakat atau yang lainnya? • Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan sanksi untuk memengaruhi lembaga/instansi/kelompok lain dalam pengelolaan ekowisata dalam bentuk Sanksi lainnya?
--	--	--

Kekuatan kompensasi *stakeholder* dalam pengelolaan ekowisata

- a. Pemberian gaji/upah
- b. Pemberian sebidang lahan
- c. Pemberian bantuan/kegiatan
- d. Pemberian award
- e. Lainnya

- Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan bantuan/kompensasi kepada pihak lain terkait dengan pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK dalam bentuk pemberian gaji/upah?
 - Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan bantuan/kompensasi kepada pihak lain terkait dengan pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK dalam bentuk pemberian sebidang lahan?
 - Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan bantuan/kompensasi kepada pihak lain terkait dengan pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK dalam bentuk pemberian Bantuan kegiatan?
 - Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan bantuan/kompensasi kepada pihak lain terkait dengan pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK dalam bentuk hadiah/penghargaan?
 - Apakah lembaga/instansi/kelompok Bapak/Ibu/Saudara memberikan bantuan/kompensasi kepada pihak lain terkait dengan pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK dalam bentuk pemberian lainnya?
-

Kekuatan
kepribadian
stakeholder
terkait
pengelolaan
ekowisata

- a. Karisma
seseorang
- b. Kekuatan fisik
- c. Kecerdasan
mental
- d. Kekayaan
- e. Lainnya

- Apakah terdapat kekuatan kepribadian didalam lembaga/instansi/ kelompok Bapak/ Ibu/Saudara, seperti jiwa kepemimpinan yang tegas, keberanian mengambil keputusan, atau lainnya?
 - Apakah terdapat kekuatan kepribadian di dalam lembaga/instansi/ kelompok Bapak/ Ibu/Saudara, berupa kekuatan fisik seperti etos kerja tinggi, tekun, pekerja keras, atau lainnya?
 - Apakah terdapat kekuatan kepribadian di dalam lembaga/instansi/kelompok Bapak/ Ibu/Saudara, berupa kecerdasan mental seperti mampu mengendalikan emosi, kemampuan berkomunikasi, atau lainnya?
 - Apakah terdapat kekuatan kepribadian didalam lembaga/instansi/ kelompok Bapak/ Ibu/Saudara, seperti modal?
 - Apakah terdapat kekuatan kepribadian didalam lembaga/instansi/ kelompok Bapak/ Ibu/Saudara, seperti lainnya?
-

Kekuatan organisasi dari *stakeholder* dalam pengelolaan ekowisata

- a. Kekuatan anggaran (≥ 30 %)
- b. Kekuatan SDM
- c. Kesesuaian bidang fungsi
- d. Kemampuan menjalin kerjasama/jejaring kerja
- e. Pemberian perijinan

- Apakah kekuatan anggaran dana lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/ Saudara yang dialokasikan memengaruhi pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK?
- Apakah jumlah SDM lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara yang dimiliki memengaruhi pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK?
- Apakah penempatan kerja dan tugas pada lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/ Saudara sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing individu?
- Apakah lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/ Saudara memiliki cakupan jejaring kerja/menjalin kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK?
- Apakah lembaga/instansi/ kelompok Bapak/Ibu/Saudara memiliki kekuatan dalam memberikan perijinan dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga TNWK?

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil angket mengenai analisis *stakeholder* selanjutnya ditabulasikan dan diolah dengan analisis statistika deskriptif. Analisis *stakeholder* dilakukan untuk penafsiran kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Proses analisis data dilakukan secara statistika deskriptif melalui teknik skoring dengan menggunakan skala likert yang didasarkan pada parameter dan indikator yang telah ditentukan. Tahapan-tahapan yang digunakan berdasarkan Reed et al. (2009) untuk menganalisis *stakeholder* sebagai berikut :

1. Identifikasi *stakeholder*.
2. Mengkategorikan *stakeholder* berdasarkan kepentingan (*interest*) dan pengaruhnya (*influence*). Sebelum dipetakan ke dalam matriks, kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) *stakeholder* dianalisis dengan skor berdasarkan parameter dan indikator sebagaimana disajikan pada tabel 6. Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan berdasarkan pada data yang diperoleh dari angket yang diisi oleh masing-masing *stakeholders* yang telah diidentifikasi.

Tabel 7. Kriteria Penilaian Tingkat Kepentingan

No	Parameter	Indikator	Penilaian				
			Ada ≤ 4	Ada 3	Ada 2	Ada 1	Tidak Ada
1	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga	a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Pelaksanaan d. Pengawasan e. Evaluasi	5	4	3	2	1
2	Manfaat pengelolaan ekowisata bagi <i>Stakeholder</i>	a. Sumber penerimaan b. Menciptakan lapangan kerja c. Membuka akses d. Promosi daerah e. Mendorong pembangunan	5	4	3	2	1

3	Kewenangan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan Ekowisata	a. Perlindungan dan pengamanan obyek wisata b. Pembangunan sarana dan prasarana c. Memberikan layanan perijinan d. Pemberdayaan masyarakat e. Penyediaan data dan informasi							
			5	4	3	2	1		
4	Program kerja <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan ekowisata	a. >20% dalam Tupoksi b. 16-20% dalam Tupoksi c. 11-15% dalam Tupoksi d. 6-10% dalam Tupoksi e. 5 % dalam tupoksi	\geq 80 %	60- 79%	40- 59 %	20- 39 %	< 20 %		
			5	4	3	2	1		
5	tingkat ketergantungan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata	a. 81-100% ekowisata sebagai sumber pendapatan b. 61-80% ekowisata sebagai sumber pendapatan c. 41-60% ekowisata sebagai sumber pendapatan d. 21-40% ekowisata sebagai sumber pendapatan e. <21% ekowisata sebagai sumber pendapatan	81- 100 %	61- 80%	41- 60 %	21- 40 %	<21 %		
			5	4	3	2	1		

Sumber : *Diolah Peneliti, 2023*

Tabel 8. Kriteria Penilaian Tingkat Pengaruh

No	Parameter	Indikator	Penilaian				
			Ada Ada ≤ 4	3	2	1	Tida k Ada
1	Kondisi kekuatan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata	a. Opini/pendapat b. Kebudayaan c. Pendidikan d. Promosi/iklan e. Aturan/pengawasan	5	4	3	2	1
2	Kondisi kelayakan <i>Stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata	a. Sanksi administrasi b. Sanksi finansial c. Sanksi hukum d. Sanksi moral e. Sanksi lainnya	5	4	3	2	1
3	Kekuatan kompensasi <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata	a. Pemberian gaji/upah b. Pemberian sebidang lahan c. Pemberian bantuan/kegiatan d. Pemberian award e. Lainnya	5	4	3	2	1
4	Kekuatan Kepribadian <i>Stakeholder</i> Terkait pengelolaan ekowisata	a. Karisma seseorang b. Kekuatan fisik c. Kecerdasan mental d. Kekayaan e. Lainnya	5	4	3	2	1
5	Kekuatan organisasi dari <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan ekowisata	a. Kekuatan anggaran ($\geq 30\%$) b. Kekuatan SDM c. Kesesuaian bidang fungsi d. Kemampuan menjalin kerjasama/jejaring kerja e. Pemberian Perijinan	5	4	3	2	1

Sumber : *Diolah Peneliti, 2023*

Tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*) dikatakan tinggi apabila mendapatkan skor lebih atau sama dengan dari median dari total skor yang ada (12,5 dengan pembulatan angka menjadi 13) dan dikatakan rendah apabila mendapatkan skor di bawah nilai median (<13). Menurut Reed et al. (2009) Analisis *stakeholder* dilakukan dengan menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan, di mana *stakeholder* diklasifikasikan sebagai *key player*, *context setter*, *subject*, atau *crowd*. Posisi *stakeholder* dalam kuadran dapat menggambarkan kategori kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) dalam pengelolaan ekowisata desa penyangga.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, terdapat 12 *stakeholders* yang terlibat dalam Pengelolaan ekowisata di desa penyangga TNWK yang berkedudukan sebagai 3 *Subject*, 3 *Key Players*, 1 *Context Setter* dan 5 *Crowds*. Dari 12 *stakeholder* tersebut yang termasuk kedalam kelompok *key players* yaitu Taman Nasional Way Kambas, *Wildlife Conservation Society*, Dan Pokdarwis/Komunitas Pesona Plang Ijo Desa Labuhan Ratu IX. *Stakeholder* yang termasuk kedalam kelompok *subject* diantaranya Koperasi desa labuhan ratu VII, Koperasi desa labuhan ratu IX, dan Pokdarwis Desa Labuhan Ratu VI. Kategori selanjutnya adalah *context setter* yaitu Dinas Lingkungan Hidup Lampung Timur. Terakhir *stakeholder* yang termasuk kedalam kelompok *crowds* terdiri dari Pokdarwis Desa Labuhan Ratu VII, KTH Rahayu Jaya, KTH Plangijo Permai, Aliansi Lestari Rimba Terpadu (Alert), Koperasi Wisata Labuhan Ratu VI.

Taman Nasional Way Kambas sebagai *key player* mempunyai keterlibatan penuh atas pengelolaan serta pengembangan ekowisata di desa-desa penyangga disekitar kawasan hutan konservasi TNWK sudah cukup baik terutama pada struktur dan fungsi taman nasional yang telah ikut berperan aktif dalam menginisiasi, mendampingi atau memfasilitasi pengembangan ekowisata di desa-desa penyangga. *Wildlife Conservation Society* dan komunitas pesona plang ijo sebagai mitra yang mendorong penerapan konsep ekowisata desa penyangga yang berkelanjutan. Adanya beberapa pemangku kepentingan yang memiliki kesamaan dalam bidang kegiatan sektor kepariwisataan memberi peluang untuk dapat bersinergi dalam pengelolaan ekowisata di desa penyangga TNWK. Namun belum

optimalnya kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dari sejumlah pemangku kepentingan memerlukan upaya upgrading yang sinergis untuk dapat memenuhi kerjasama dan standar dipersyaratkan.

Dampak yang berikan oleh berbagai *stakeholder* yang terkategori pada kelompok *crowds* dan *subject* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemajuan atau perkembangan ekowisata di desa penyangga. Mereka menganggap bahwa kewenangan yang mereka dapatkan tidak begitu besar sehingga mereka lebih terfokus pada pelaksanaan secara teknis dilapangan. Sementara pada kenyatannya berjalan atau tidaknya berbagai program ekowisata sangat bergantung pada kinerja mereka. Terdapat beberapa aspek yang belum mampu mendorong pengaruh serta kepentingan dari para *stakeholder* ini diantaranya keterbatasan anggaran, minimnya kewenangan *stakeholder*, dan lemahnya kekuatan organisasi dalam mempengaruhi berbagai proses pengelolaan ekowisata di desa penyangga.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Taman Nasional Way Kambas

- a. Memberikan *reward* atau kompensasi atas kinerja masing-masing *stakeholder* yang terlibat sehingga secara perlahan dapat meningkatkan kekuatan anggaran dan keterlibatan dari *stakeholder* lainnya terhadap pengelolaan ekowisata.
- b. Balai Taman Nasional Way Kambas sebagai instansi pemerintah yang berkewenangan mengelola kawasan tersebut harus terus mengupayakan pemeliharaan dan perbaikan pada berbagai sarana dan prasarana pendukung ekowisata.
- c. Balai Taman Nasional Way Kambas dapat memberikan kewenangan berupa melibatkan dalam perencanaan kepada *stakeholder* pada kategori *crowds* dan *subject* untuk meningkatkan pengaruh mereka terhadap pengelolaan ekowisata

5.2.2 Saran untuk Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olahraga Lampung Timur

- a. Melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat seperti menyediakan wadah pelatihan serta pengembangan diri sebagai langkah meningkatkan kualitas SDM di lapangan sehingga secara tidak langsung akan mendorong aspek kepentingan serta keterlibatannya terhadap pengelolaan ekowisata.
- b. Memfasilitasi berbagai program ekowisata di desa penyangga sehingga hal ini akan meningkatkan tupoksi program kerja dari Dinas Pariwisata.

5.2.3 Saran untuk Komunitas atau Kelompok Koperasi Desa

- a. Komunitas diharapkan dapat lebih kuat dan vokal dalam menyuarakan opini/pendapat mereka sebagai upaya meningkatkan aspek pengaruh mereka.
- b. Meningkatkan kualitas budaya organisasi mereka dengan cara seperti membangun komunikasi yang efektif, menyediakan wadah pengembangan diri, serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala guna menetapkan standard kinerja anggota.
- c. Diharapkan dapat lebih menjaring atau menambah keterlibatan masyarakat desa kedalam pengelolaan ekowisata sehingga dengan hal ini akan memaksimalkan kontribusi serta manfaat ekonomi dapat disebarkan secara adil dan merata di antara warga setempat serta menjalin kerjasama dengan usaha nmikro kecil menengah (UMKM) sebagai langkah menstabilkan kekuatan anggaran/finansial.
- d. Pokdarwis/Komunitas Pesona Plangijo diharapkan mampu mengambil peran sebagai pengawas atau monitoring kegiatan di

lapangan dalam menjaga proses pengelolaan ekowisata. Dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh komunitas ini tentunya dapat menjadi role model bagi *stakeholder* lainnya.

5.2.4 Saran untuk Kelompok Tani Hutan

Dengan membuka akses atau merencanakan berbagai program yang lebih relevan dengan konsep ekowisata sehingga nantinya masing-masing kelompok tani hutan dapat menerima manfaat yang lebih dari aspek sumber penerimaan/pendapatan mereka. Dengan keterlibatan tupoksi program kerja yang lebih tinggi tentunya akan meningkatkan ketergantungan mereka dari segi pendapatan, sehingga hal ini akan mendorong rasa memiliki atas dan bertanggungjawab atas pengelolaan ekowisata.

5.2.5 Saran untuk Mitra Khusus TNWK

- a. *Wildlife Conservation Society* (WCS) dapat meningkatkan intensitas kegiatan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat setempat dengan tujuan upgrading kualitas sumber daya manusia dilapangan. Hal ini terkait dengan identifikasi dan diskusi bagaimana langkah yang tepat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dapat diintegrasikan kedalam konsep ekowisata.
- b. Aliansi Lestari Rimba Terpadu (ALERT) dapat memberikan berbagai bentuk bantuan kegiatan kepada *stakeholder* atau komunitas di desa penyangga sebagai bentuk apresiasi dan memotivasi mereka agar dapat menumbuhkan budaya tanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackermann, F., Eden, C. (2011). *Strategic Management Of Stakeholders: Theory And Practice. Long Range Planning*, 179-196.
- Akbar, R., Dkk. (2022). Collaborative Governance Analysis in Eradication of Narcotics in the Province of the Special Capital Region of Jakarta.
- Alviya, I., Suryandari, E. Y., Maryani, R. (2016). Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*.
- Alonso, A., Nyanjom, J. (2015). *Current Issues in Tourism Local stakeholders, role and tourism Development. Current Issues in Tourism*.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Edisi 1*. Airlangga University Press.
- Ansell, C., Gash, A. (2008). *Collaborative Governance In Theory And Practice : Journal Of Public Administration Research And Theory*
- Arida, I. Y. S. (2017). *EKOWISATA : Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata: Cakra Press. Bali*.
- Baso, A. (2016). *Analisis Stakeholder dalam Penangulagn Maslah Sosial Imigran Gelap di Kota Makassar*.
- Bryson, M. J. (2003). *Perencanaan Strategis, Yogyakarta : Pustaka Pelajar*
- Dwiastuti, D.A. (2021). *Pengelolaan Ekowisata Kerujuk Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara*.
- Damanik, J., Weber, H. F. (2006), *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi, Yogyakarta: Andi Offset*.
- Drumm, A., & Moore, A. (2002). *The business of ecotourism development and management*.
- Fandeli, C., Nurdin, M. (2005). *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi Di Taman Nasional : Fakultas Kehutanan Ugm Press*.
- Freeman, R. E. 2010. *Strategic Management: A Stakedholder Approach*. New York: Cambridge University Press.

- Friedman, A., Miles, S. (2006) *Stakeholders: Theory and Practice*. Oxford University Press, Oxford.
- Fennel, D. A. (1999). *Ecotourism, An Introduction*. New York: Routledge
- Groenendijk, L. (2003). *Planning and management tools*. The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC). Netherlands
- Grimble, R., Wellard, K. (1997). *Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management: A Review of Principles, Contexts, Experiences and Opportunities*.
- Gunawan, M.A. (2021). Strategi Pengembangan Potensi Ekowisata Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Handayani, F., Warsono, H. (2018). Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang.
- Harmoni, A. (2013). *Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in Indonesia*. *International Conference on Eurasian Economies 2013*, Diakses pada <https://doi.org/10.36880/c04.00704>
- Hörisch, J., Freeman, R. E., & Schaltegger, S. (2014). *Applying Stakeholder Theory in Sustainability Management: Links, Similarities, Dissimilarities, and a Conceptual Framework*. *Organization and Environment*, 27(4), 328–346. <https://doi.org/10.1177/1086026614535786>
- Iqbal, M. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*.
- Kagungan, D., Yulianti, D. (2019). Sinergitas Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Pisang Island Sebagai Wisata Bahari: Studi Kasus Di Daerah Tertinggal.
- Latupapua, Y. (2007). Studi Potensi Kawasan dan Pengembangan Ekowisata di Tual Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Agroforestri*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, A.B. (2022). Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Pariwisata Candi Sukuh Kabupaten Karanganyar.
- Nugraheni, E., (2002). Sistem Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Gunung Halimun). Tesis. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Nurhikmah, U. (2017). Analisis *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Hutan Pendidikan Bendo-Bendo Unhas Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Oktavia, S., Saharuddin. (2013). Hubungan Peran *Stakeholder* dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan Desa karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Bogor: Jurnal Sosiologi Pedesaan
- Page, S.J., Ross, D.K. (2002). *Ecotourism* Pearson Education Limited. China.
- Pitana, I.G., Diatra, I.K. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Persada, C. (2018). *Perencanaan Pariwisata Dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan*. Bandar Lampung: Aura.
- Putra, T. R. (2013). Peran Pokdarwis Dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul
- Rahmanita, M., Asmaniati, F., Dkk. (2022). Analisis Pemangku Kepentingan Pada Pengelolaan Ekowisata Di Siberut Selatan Kepulauan Mentawai, Indonesia; Jurnal Pariwisata.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Dkk. (2009). *Who's in and why? a typology of stakeholder analysis methods for natural resource management*. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949.
- Sulastri. (2017). Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Raya Massenrempulu Enrekang.
- Sulistiowati, R., Yulianto Dkk. (2022). *Eco-Tourism In Era 4.0 For Sustainable Tourism (Case Study In Buffer Village Of Way Kambas National Park, Lampung, Indonesia)*
- Suryadiarta, I.K. (2012). Implementasi Ekonomi Hijau di Bidang Pariwisata: Kasus di Yayasan Karang Lestari, Desa Pemuteran, Gerokgak, Buleleng, Bali.
- Sentanu, I.G., Prabowo, A., Kumalasari, Klara., Dkk. (2021). *Stakeholder Collaboration Model For Ecotourism Development In Indonesia: Case Study From Batu City East Java Province*. *Journal Of Government And Civil Society*.
- Tresiana, N., Noverman, D. (2017). Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan.
- Utami, N. L. (2017). Kepuasan Wisatawan Tentang Daya Tarik Wisata Di Objek Wisata Pantai Gandoriah Pariaman. *Jurnal Pariwisata*.
- Susilo, M.E., Prayudi & Herastuti, H. (2017). Membangun Desa Ekowisata : LPPM UPN Veteran Yogyakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, M. L., Soekmadi, R., & Arifin, H. S. (2018). Analisis *Stakeholders* Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*.
- Waligo, V. M., Clarke, J., & Hawkins, R. (2013). Implementing sustainable tourism: A multi-stakeholder involvement management framework. *Tourism Management*, 36, 342–353.